



## PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 6 TAHUN 2006

### T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2006  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
6. undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
9. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) ;
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta jumlah kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287 ) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540 ) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417 ) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503 ) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513 ) ;

4

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574 ) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857 ) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575 ) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 ) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4582 ) ;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri E tanggal 16 Maret 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Seri E tanggal 1 Nopember 2005);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Seri E tanggal 31 Maret 2005 ) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Seri A tanggal 10 MARET 2006 ) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 tanggal 18 Juli 2006 ).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PACITAN  
Dan  
BUPATI PACITAN

m e m u t u s k a n

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN  
ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 402.033.745.945,00 Bertambah / berkurang sejumlah Rp. 40.999.948.998,43 Sehingga menjadi Rp. 443.033.694.943,43 Dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 404.531.745.945,00	
b. Bertambah/(berkurang) Rp. <u>12.046.380.918,72</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.416.578.126.863,72
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 402.033.745.945,00	
b. Bertambah/(berkurang) Rp. <u>40.999.948.998,43</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.443.033.694.943,43
Surplus/(deficit) setelah perubahan		<u>(Rp.26.455.568.079,71)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah/berkurang Rp.29.876.670.687,71		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.29.876.670.687,71
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 2.498.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang Rp. 923.102.608,00		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 3.421.102.608,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan		<u>Rp. 26.455.569.079,71</u>

Pasal 2

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah ;
4. Lampiran IV : Daftar Piutang Daerah ;

+

- 5. Lampiran V : Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;
- 6. Lampiran VI : Daftar Dana Cadanga ;
- 7. Lampiran VII : Daftar utang atau Pinjaman Daerah dan
- 8. Lampiran VIII : Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

**Pasal 3**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 4**

Sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Bupati Pacitan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 8 - 12 - 2006

BUPATI PACITAN



H. S U 3 O N O

5. Lampiran V : Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah ;  
6. Lampiran VI : Daftar Dana cadanga ;  
7. Lampiran VII : Daftar utang atau Pinjaman Daerah dan  
8. Lampiran VIII : Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan Operasional Pelaksanaan Bupati Pacitan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal 8 - 12 - 2006

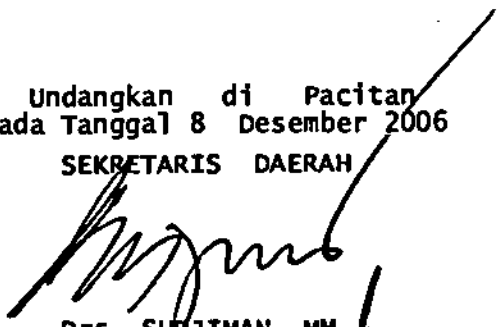
BUPATI PACITAN

TTD

H. S U J O N O

Di Undangkan di Pacitan  
Pada Tanggal 8 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. SUJIMAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP.510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 6